

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang umum terjadi di berbagai negara dan mendapat perhatian khusus baik dari pengambil kebijakan maupun akademisi, karena jika tidak teratasi akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran secara terus-menerus menjadi masalah berkepanjangan yang disebabkan oleh masih rendahnya penempatan pencari kerja di pasar kerja, dikarenakan pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Adanya pengangguran dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial dan ekonomi. Sebagai permasalahan makro ekonomi, pengangguran menjadi penghambat pembangunan karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, hilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan serta tingkat kesejahteraan

masyarakat yang menurun bahkan bisa berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin apabila masalah pengangguran tidak diatasi dengan serius.¹

Pengangguran menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Islam sangat melarang umatnya untuk menganggur. Tujuan pengentasan pengangguran dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam cenderung sama yaitu keduanya sama-sama berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur agar tidak terjerumus kemiskinan, karena ditakutkan kemiskinan dapat membawa manusia berbuat apa saja termasuk yang merugikan.² Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl : 97)³

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang orang tersebut laki-laki atau perempuan. Pada ayat

¹ Khodijah Ishkak, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 7, No. 1, (2018): 22-38, hal. 24

² Tetti Maisyaroh Lubis, “Inflasi dan Pengangguran dalam Islam”, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, (2023), hal. 2

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, hal. 278

tersebut terdapat tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan.

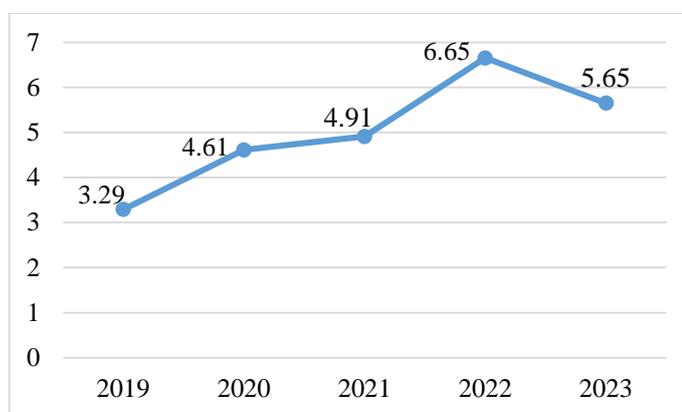
Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tidaklah luput dari yang namanya pekerjaan, orang yang bekerja dapat kita maksudkan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan orang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak semua orang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tenaga kerjalah yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah angkatan kerja yang bekerja minimal 36 jam seminggu. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk dengan umur produktif, atau penduduk yang berumur 15 s/d 55 tahun, kecuali ibu rumah tangga, dan penduduk yang sedang menempuh pendidikan (*school going age*) yang merupakan *potential supply* dari tenaga kerja secara nasional.⁴ Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional.

Angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih mencari pekerjaan maka disebut penganggur. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan

⁴ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial – Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 474

masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Gambar 1.1
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung (*Tulungagung dalam Angka 2019, 2020, 2021, 2022, 2023*)⁵

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 5 tahun ini, tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran sebesar 3.29% dengan jumlah pengangguran sebesar 19.201 jiwa, kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 4.61% dengan jumlah pengangguran sebesar 27.951 jiwa dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tulungagung melonjak tinggi sebesar 6.65% dengan jumlah

⁵ BPS Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2019, 2020, 2021, 2022, 2023*, diakses pada November 2023

penganggur 40.148 jiwa. Dan pada tahun 2023 berhasil mengalami penurunan menjadi 37.579 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5.65%. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingginya jumlah PHK dan kesempatan kerja yang semakin terbatas diduga kuat menjadi pemicu utama tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung. Angkatan kerja yang terus meningkat jika tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maka pengangguran juga semakin meningkat. Untuk itu Pemerintah diharapkan terus menekan jumlah pengangguran tersebut dikarenakan masih rendahnya penempatan pencari kerja di pasar kerja.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Se Karesidenan Kediri
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Kediri	4.15	6.21	6.37	4.38	4.06
Kabupaten Nganjuk	3.16	4.80	4.98	4.74	4.68
Kabupaten Tulungagung	3.29	4.61	4.91	6.65	5.65
Kabupaten Blitar	4.54	6.68	6.61	5.39	5.24
Kabupaten Trenggalek	3.36	4.11	3.53	5.37	4.52

Sumber: BPS Jawa Timur Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus⁶

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi.

⁶ BPS Jawa Timur, *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten /Kota (Persen) 2019-2023*, dalam jatim.bps.go.id, diakses pada Juni 2024

Berbeda dengan Kabupaten Tulungagung yang terus mengalami peningkatan dan berhasil turun di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten lain, tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 dan tahun 2023 ini Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang paling tinggi. Walaupun berhasil mengalami penurunan, akan tetapi angka tersebut masih belum signifikan. Oleh karena itu, peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui peran pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung.

Guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, stabil dan berkelanjutan serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil, banyak langkah yang bisa dilakukan, salah satunya memaksimalkan potensi sumber daya manusia atau tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam mengatasi pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat. Peluang untuk memecahkan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif. Hal tersebut diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan serta meratakan seluruh pendapatan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang produktif akan memberikan imbalan dan penghargaan yang layak serta mempunyai peranan yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Pemerintah melihat penyandang masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial (*sosial disfunctions*). Artinya pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi berfungsi sosial yakni masyarakat mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah tidak sekadar ditingkatkan ekonominya, tetapi yang lebih penting dilatih dan diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya.⁷

Keberadaan instansi pemerintah sebagai lembaga yang membuat kebijakan dan wewenang dalam mengoptimalkan masalah tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pembangunan di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, ayat (2) yang menyatakan bahwa "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".⁸

Dengan demikian, ketenagakerjaan merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi

⁷ Mohammad Mulyadi, *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hal. 234

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban", dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada Agustus 2023

kemanusiaan. Semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan yang akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan khususnya masalah penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Permasalahan mengenai kesempatan kerja ini menjadi semakin penting dan mendesak karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang terserap oleh lapangan kerja semakin sedikit. Hal ini berakibat pada tingkat pengangguran yang semakin meningkat.

Berdasarkan pra observasi yang telah peneliti lakukan ketika melaksanakan kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung. Bisa dilihat dari program-program yang dijalankan Disnakertrans melalui Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi yaitu seperti program pelatihan dan pemberian bantuan stimulan, program padat karya, program *Job Fair* (bursa kerja), pelatihan bagi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), program pembangunan kawasan transmigrasi, pelayanan antar kerja, serta perlindungan PMI (pra dan purna penempatan).⁹

Ketika melakukan pra observasi, peneliti menemukan bahwa program-program yang dilakukan melalui layanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung melalui Layanan Terpadu

⁹ Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, *Rencana Kinerja (RENJA) Disnakertrans Kabupaten Tulungagung Tahun 2023*, (Tulungagung: Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, 2022), hal. 7

Satu Atap (LTSA) memiliki banyak peminat, karena bisa dilihat setiap harinya banyak calon pekerja atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang membutuhkan layanan yang ada pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) tersebut contohnya adalah dengan layanan pembuatan AK/1 atau kartu kuning. Penerbitan AK/1 sendiri merupakan serangkaian program yang dijalankan oleh Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan penempatan tenaga kerja melalui layanan antar kerja. Melalui layanan tersebutlah pencari kerja dapat terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga peneliti dapat mengetahui lebih dari 100 Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tiap bulannya. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa program *Job Fair*/bursa kerja banyak dihadiri oleh pencari kerja di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Melihat antusiasme masyarakat tersebut menjadikan salah satu alasan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema ini.

Alasan peneliti memilih tema ini karena, selaku Perangkat Daerah pelaksana Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung melaksanakan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sehingga masalah pokok ketenagakerjaan yaitu pengangguran dapat ditangani. Akan tetapi, pada kenyataannya angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun terus meningkat dan kemungkinan besar dapat berdampak pada masalah-masalah sosial

ekonomi lainnya. Hal tersebut menjadikan persoalan mendasar peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Mengingat lagi pentingnya peran pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi masalah tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung, untuk itu peneliti mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah pengangguran dan peran pemerintah dengan judul **“Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Menekan Angka Pengangguran (Studi Kasus Pada Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pengangguran di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana implementasi program-program yang dilakukan oleh Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, secara umum tujuan atau maksud yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kondisi pengangguran di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis peran Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui implementasi dari program-program yang telah dilakukan oleh Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Pada suatu penelitian pasti ada suatu kemungkinan yang pasti akan muncul, kemungkinan itu dapat berupa cakupan ataupun permasalahan. Adapun penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang telah diidentifikasi dan diinvestasikan dalam jumlah banyak dikenal dengan identifikasi penelitian. Kemudian dalam melakukan identifikasi penelitian, dilakukan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan untuk menetapkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti.

Permasalahan penelitian dibatasi agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki serta dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan teori-teori

dari peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan penelitian kedalam beberapa hal diantaranya:

1. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi (PENTA) di Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dijadikan sebagai lokasi penelitian. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi merupakan divisi dalam Disnakertrans yang mempunyai tugas melaksanakan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
2. Penelitian dibatasi pada peranan Disnakertrans dalam menyiapkan tenaga kerja agar tenaga kerja mampu bersaing di dunia kerja melalui Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
3. Subjek penelitian adalah Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dan pencari kerja di Kabupaten Tulungagung. Keduanya merupakan penyelenggara dan peserta dalam melaksanakan program pemerintah yaitu dalam hal menekan angka pengangguran.
4. Obyek terfokus pada program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang diselenggarakan Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam menekan angka pengangguran.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan ilmu pengetahuan dan teori yang memiliki manfaat dalam ilmu ekonomi khususnya pada penanggulangan masalah pengangguran. Dan dapat memberikan pengetahuan mengenai peran Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung, serta realisasi & kendala dari pelaksanaan program-program yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, sehingga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung dengan optimal.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bahan informasi dan bahan acuan atau referensi tambahan dalam mengembangkan karya ilmiah. Serta dapat memberikan jangkauan wawasan, serta ilmu pengetahuan mengenai peran Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran awal dalam melakukan penelitian tentang peran Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung. Serta diharapkan dapat dijadikan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya guna melakukan penelitian dengan tema yang sama.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Peran Pemerintah

Peran yang berkaitan dengan pemerintah didefinisikan sebagai upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan secara terencana menuju masyarakat modern.¹⁰

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan pelaksana otonomi daerah atau perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melakukan pengaturan dan koordinasi perencanaan tenaga kerja,

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 142

perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.¹¹

c. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan. Angka pengangguran menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan.¹²

2. Definisi Operasional

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perangkat daerah memiliki peran penting dalam menangani masalah ketenagakerjaan termasuk dalam menekan angka pengangguran. Melalui Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi (PENTA) Disnakertrans Kabupaten Tulungagung berupaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung dengan menjalankan berbagai program.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun maksud adanya sistematika penulisan skripsi adalah untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi setiap bab pada skripsi ini dan untuk mempermudah penulis dalam proses penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

¹¹ Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi”, dalam <https://opendata.jabarprov.go.id/id/organisasi/dinas-tanaga-kerja-dan-transmigrasi?data=dataset>, diakses pada Agustus 2023

¹² Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 214

dalam Menekan Angka Pengangguran (Studi Kasus Pada Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tulungagung)” adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul luas, halaman sampul depan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari beberapa bab yakni sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN berisi gambaran singkat mengenai hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab 1 ini merupakan pengantar untuk menjabarkan konteks penelitian yang sedang diteliti serta menjabarkan fokus penelitian dan alasan dari perlu dilakukannya penelitian ini.
- b. BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi uraian tentang penjelasan teori-teori sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu serta kerangka berpikir teoritis. Pada bab 2 ini, teori-teori akan disesuaikan dengan *grand theory* yang ada pada bab 1, dan bahan kajiannya diangkat dari berbagai macam referensi.

- c. BAB III METODE PENELITIAN berisi rancangan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Adanya metode penelitian ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan topik yang akan dibahas.
- d. BAB IV HASIL PENELITIAN berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian, paparan penelitian dan temuan penelitian. Adapun pada penelitian kualitatif paparan data akan disajikan sesuai dengan pertanyaan pada fokus penelitian dan temuan penelitian serta analisis data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi serta deskripsi informasi lainnya.
- e. BAB V PEMBAHASAN berisi uraian keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang ada di lapangan. Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian berdasarkan kumpulan pertanyaan yang telah ada, kemudian mengintegrasikan berbagai hasil penelitian dengan pengetahuan yang ada, dan memodifikasi hasil penelitian dengan teori yang ada maupun dengan teori yang baru. Serta menjelaskan implikasi penelitian serta keterbatasan penelitian.

- f. BAB VI PENUTUP berisi uraian singkat hasil temuan pokok atau kesimpulan temuan-temuan tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan skripsi dan daftar riwayat hidup peneliti.